

# **IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) KEPADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT YANG BERADA DI KOPERASI SAMUDRA SEJAHTERA (KOMURA) PELABUHAN SAMARINDA**

**Desi Krisvin Hasibuan<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Artikel ini menyoroti tentang implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda, fokus utama penelitian yang ditetapkan adalah mengetahui bagaimana implementasi kesehatan dan keselamatan dengan indikator-indikatornya adalah alat perlindungan kerja, pemeliharaan kesehatan, serta faktor penghambat. Artikel ini berargumentasi bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya kesadaran para pekerja dalam menggunakan alat perlindungan diri, metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.*

***Kata Kunci :*** *Implementasi, Kesehatan Dan Keselamatan (K3) Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.*

## **Pendahuluan**

Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena apabila hal tersebut diabaikan maka kecekaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang di lakukan oleh para pekerja itu sendiri, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan mengalami gangguan seperti tenaga kerja yang diperlukan menjadi berkurang.

Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adapun di Negara kita, Undang-undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan terjamin (UUD1945 pasal 27).

---

<sup>1</sup>Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: deassykrisvin\_h@yahoo.co.id

Kesehatan kerja meliputi pelaksanaan kesehatan, peralatan, dan pemeliharaan kesehatan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral tenaga kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Demikian pula dengan keselamatan dan kesehatan kerja di “Koperasi Samudra Sejahtera” (KOMURA) pelabuhan samarinda. Yang menaungi Tenaga Kerja Bongkar Muat di mana Tenaga kerja bongkar muat merupakan faktor penggerak dan pelaksana dalam kegiatan organisasi perusahaan bongkar muat yang berada di pelabuhan samarinda. Keselamatan dan keamanan yang di butuhkan oleh tenaga kerja pada saat melakukan kegiatan bongkar muat barang, di mana para pekerja disarankan untuk memakai segala perlengkapan keamanan tubuh. Namun kenyataannya masih saja ada pekerja yang tidak menghiraukan kegunaan dari peralatan keamanan dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang tersebut.

Mengetahui sasaran sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta melakukan audit kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cara penanganan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja pada para pekerja. Dan berdasarkan permasalahan di atas mendorong penulis tertarik untuk meneliti mengenai fenomena yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan, peralatan yang di gunakan, pemeliharaan kesehatan, dan juga faktor penghambat dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dapat dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan judul: “Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Yang Berada Di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Untuk melaksanakan pembangunan maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan guna membantu proses pembangunan dan memecahkan masalah-masalah yang ada pada masyarakat sebagaimana pengertian yang diungkapkan oleh *Carl J.Friedrich* (dalam Winarno 2002:16) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu yang diinginkan.

Secara umum istilah kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang penjahat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Robert Eystone (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Suatu kebijakan dikatakan sebagai kebijakan publik apabila membawa manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan, jauh lebih banyak dan lebih besar dari pengguna langsungnya.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Sahartier (dalam Wahab, 2004 : 51) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Dengan demikian kebijakan dipandang sebagai suatu proses, yang meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi, suatu kebijakan di formulasikan atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan atau dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

### ***Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

Keselamatan Kesehatan Kerja pada setiap perusahaan sudah di dasari landasan hukum, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sudah termasuk dalam landasan hukum. Dan landasan hukum yang digunakan dalam setiap perusahaan ialah Undang-undang 1970 nomor 1 tentang tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Dan masuk juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor.

**PER 05/MEN/1996** tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya

yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko. Suma'mur (2001:1) Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar para pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial, dengan usaha preventif, terhadap penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. Tujuan kesehatan kerja adalah untuk melindungi pekerja dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan akibat kerja.

### ***Lingkungan Tempat Kerja***

Lingkungan adalah lingkungan tempat kerja yang terjadi akibat dari suatu kegiatan di pelabuhan : temperatur atau suhu atau dingin, kelembaban, berdebu, kebisingan, dan lain-lain. Faktor-faktor di atas dapat berdiri sendiri atau bahkan saling interaksi atau bersama-sama terlibat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Dalam melakukan pemeriksaan kecelakaan, faktor-faktor tersebut harus menjadi dasar pemikiran untuk mencari penyebab kecelakaan serta membuat koreksi dan tindakan pencegahan. Lingkungan tempat kerja merupakan suatu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, karena hal tersebut menimbulkan sakit akibat bila terlalu lama.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, maka penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Maleong (2000:90) penelitian kualitatif yaitu: "Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh. Dalam hal ini mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

#### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan bertitik tolak pada referensi diatas, maka fokus penelitian yang penulis tetapkan meliputi :

1. Pelaksanaan Keselamatan Kerja dengan indikator Alat Perlindungan Kerja yaitu : helm, septy, sarung tangan, dan pakaian kerja.
2. Pelaksanaan Kesehatan Kerja dengan indikator Pemeliharaan Kesehatan bagi para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam rangka perlindungan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) di pelabuhan Samarinda.

### ***Sumber Data***

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yakni:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang akan diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder diperoleh melalui sumber informan, melalui dokumen-dokumen, arsip dan laporan evaluasi.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini menurut Nasution (1998:34) meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Memasuki penelitian (*getting in*) dalam tahap ini, peneliti memasuki lokasi Kantor Koperasi Sejahtera (KOMURA) Kota Samarinda dengan membawa ijin formal atau permohonan sebagai bukti menemui informan kunci untuk menjelaskan maksud penelitian ini. Untuk mendapatkan kevalidan data peneliti beradaptasi dan belajar dengan informan tersebut.
2. Berada di lokasi penelitian (*getting a long*) pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subjek peneliti, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan serta menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
3. Mengumpulkan data (*longging data*) ada 3 macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :
  - a. Observasi : yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek-objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang terjadi.
  - b. Wawancara : yaitu cara untuk mendapatkan data-data dengan melakukan interview dengan orang-orang yang merupakan sumber keterangan dan mengetahui implementasi program Kesehatan dan Keselamatan kerja kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) pelabuhan Samarinda.
  - c. Dokumentasi : Sugiyono (2009:226) mengemukakan bahwa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kategorisasi dan klarifikasi bahan yang tertulis maupun gambar. Dimana studi dokumen ini sebagai bahan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu selain penulis mengumpulkan data melalui observasi atau penelitian di Koperasi Samudra Sejahtera di pelabuhan samarinda kemudian melakukan wawancara secara langsung pada pihak yang

ditunjuk sebagai *informan* dan *key informan* peneliti juga mendapatkan data gambar atau foto dokumentasi selama melakukan penelitian.

## Hasil Peneliti Dan Pembahasan

### ***Gambaran Umum Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA)***

Pelabuhan Samarinda merupakan salah satu wilayah kerja Pelabuhan Indonesia IV, pelabuhan yang berada di Kalimantan Timur dengan luas daratan 211.440 km<sup>2</sup>. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian timur yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar seperti migas dan batu bara dari hasil tambang, kayu dan rotan dari hasil hutan, serta kelapa sawit dari hasil perkebunan. Secara umum keadaan tepi pantai berlumpur daratan daerah lingkungan kerja Pelabuhan Samarinda 50 meter dari arah tepi sungai sampai batas jalan Yos Sudarso, sedangkan batas daerah kepentingan Pelabuhan 180 meter dari tepi sungai dan batas memanjang mulai dari Sungai Karang Mumus sampai jalan Niaga Barat.

Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda adalah Koperasi yang menangani TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), dengan mengemban **visi** yaitu dengan “*Menjadikan Tenaga Kerja Yang Handal Dan Terampil Untuk Melakukan Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan, Sehingga Dapat Meningkatkan Kelancaran Dan Produktivitas Bongkar Muat*”. Serta mewujudkan kualitas TKBM yang profesional dalam menghadapi perkembangan teknologi angkutan laut dan arus globalisasi.

### **Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.**

#### ***a. Alat Perlindungan Diri***

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknik berupa pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Alat perlindungan kerja adalah alat-alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya-bahaya kecelakaan (Suma'mur 1991 : 34). Keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya sehingga perlu digunakan alat-alat perlindungan diri yang memenuhi persyaratan seperti berikut ini : enak dipakai, tidak mengganggu pada saat bekerja, dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya yang ada di tempat kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja perlu diperhatikan sedini mungkin karena tenaga kerja merupakan motor penggerak dari suatu hal yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pengusaha agar setiap tenaga kerja senantiasa dalam kondisi yang aman dan sehat. Macam-macam alat perlindungan (Proteksi) diri adalah sebagai berikut :

1. Sarung tangan harus diberikan kepada tenaga kerja dengan pertimbangan akan bahaya-bahaya dan persyaratan yang diperlukan, antara lain

syaratnya adalah bebasnya bergerak jari dan tangan. Macamnya tergantung pada jenis kecelakaan yang akan dicegah yaitu tusukan, sayatan, terkena benda panas, terkena bahan kimia, terkena aliran listrik dan terkena radiasi.

2. Sepatu pengaman yang melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh beban-beban berat yang dapat menimpa kaki seperti paku atau benda-benda tajam yang lainnya.
3. Topi pengaman dipakai oleh tenaga kerja untuk melindungi kepala agar terlindungi dari benda-benda yang terjatuh, topi yang digunakan harus cukup kokoh dan keras namun ringan

Pelaksanaan keselamatan kerja yang dimulai dari alat perlindungan kerja sudah berjalan dengan baik dimana pengadaan akan alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak koperasi selain itu pula pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya alat perlindungan diri akan tetapi masih ada pendapat yang mengatakan bahwa masih ada kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja itu sendiri seperti mengabaikan akan pentingnya memakai alat perlindungan diri, membuat alat pelindung diri tidak berfungsi, dan gagalanya tenaga kerja dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi.

#### ***b. Pemeliharaan Kesehatan***

Pemeliharaan kesehatan di maksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang pengembangan. Untuk itu Koperasi Samudra Sejahtera mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Pemeliharaan kesehatan ini meliputi tindakan pencegahan, pengobatan, dan tindakan rehabilitasi.

Sesuai dengan Dasar hukum yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan ialah UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 35 : “pemberian kerja wajib memberi perlindungan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja”.

Jaminan pemeliharaan kesehatan memiliki karakteristik, sebagai berikut :

1. Keanekaragaman penyakit dengan proses penyembuhannya. Jenis dan berbagai penyebab seseorang terserang penyakit memunculkan keanekaragaman fasilitas penyembuhan seperti praktek dokter, pelayanan rumah sakit termasuk berbagai jenis peralatannya dan obat-obatan. Lingkup proses penyembuhan suatu penyakit yang beraneka ragam yang memerlukan keahlian tersendiri.
2. Administratif, penggantian biaya kesehatan bersifat ritel dan terjadi secara harian. Rincian detil informasi yang terkandung dalam proses penggantian biaya penyembuhan memerlukan disiplin administrasi yang tinggi.
3. Biaya penyediaan fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa biaya setiap jenis pelayanan kesehatan setiap tahunnya meningkat lebih tinggi dari tingkat inflasi umum.

4. Resiko yang dihadapi sakit tidak mengenal siapa, kapan dan dimana. Serangan penyakit dapat terjadi terhadap setiap karyawan setiap saat. Dari sudut pandang perusahaan ketidakpastian terjadinya penyakit, jenis dan proses penyembuhan memunculkan resiko penyediaan biaya yang besarnya tidak dapat diduga.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat yang dikelola langsung oleh komura dimaksudkan agar pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan di lokasi kerja mereka dapat langsung mendapatkan pertolongan secara cepat di rumah sakit tanpa harus mengikuti prosedur yang berbelit-belit yang membuat tenaga kerja semakin parah, selain itu pula dengan menyediakan poliklinik bagi tenaga kerja memberkan kenyamanan kepada tenaga kerja untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pemeliharaan kesehatan sudah berjalan dengan baik dengan didirikannya poliklinik dan juga jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan juga jaminan hari tua bagi tenaga kerja, dengan melakukan cek up kesehatan dapat mengetahui kesehatan pekerja yang akan melakukan kegiatan bongkar muat.

Pihak koperasi juga menanggung jaminan kesehatan kepada keluarga pekerja yaitu satu istri yang sah dan dua orang anak, sehingga para pekerja tidak harus pusing untuk melakukan pengobatan. Dengan memberikan kwitansi atau rincian biaya pengobatan kepada pihak koperasi maka uang pengobatan dapat di cairkan untuk tenaga kerja.

### ***Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)***

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti gagal dalam memperingati pekerja, gagal mengamankan pekerja, dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri oleh tenaga kerja sendiri seperti tidak memakai alat pelindung diri yang semestinya yang telah di berikan oleh pihak Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA).

Sulitnya merubah watak para tenaga kerja untuk dapat memahami pentingnya menggunakan alat pelindung diri pada saat akan melakukan kegiatan bongkar muat selain itu pula lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan lokasi hiburan malam yang membuat kondisi tenaga kerja tidak baik.

Lokasi tenaga kerja yang terkadang di lakukan di laut juga membuat para pengawas mengalami kesulitan dalam mengawasi tenaga kerja dalam penggunaan alat pelindung diri, selain itu pula apabila terjadi kecelakaan kerja di laut hanya dapat di berikan pertolongan seadanya kepada tenaga kerja sehingga pengadaan tenaga medis di lokasi dan juga obat-obatan sangat di perlukan oleh tenaga kerja untuk dapat bertahan sampai ke darat.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan akhir disertai dengan saran-saran sebagai sumbangan pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan skripsi di masa mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut :

1. Penanganan keselamatan kerja pada Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar seperti penggunaan helm proyek yang kuat menahan benda-benda keras yang terjatuh, penggunaan sefty yang mampu melindungi kaki dari benda-benda tajam, sarung tangan yang tebal untuk melindungi tangan pada saat akan melakukan kegiatan bongkar muat, dan baju kerja pada saat akan memasuki area pelabuhan. Akan tetapi masih saja ada kecelakaan yang dialami oleh pekerja diakibatkan dari kelalaian pekerja itu sendiri seperti tidak menggunakan akan pelindung kerja secara lengkap.
2. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda harus diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung kerja untuk menghindari kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi di lokasi kerja. Karena alat pelindung diri merupakan pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena kecelakaan sendiri bisa terjadi karena faktor alam atau pun dari manusia itu sendiri
3. Pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja bongkar muat berupa jaminan sosial bagi tenaga kerja, dimana setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan akan keselamatan diri mereka. Jaminan sosial dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan juga jaminan hari tua, dengan mengelola sendiri jaminan kesehatan agar tenaga kerja tidak harus dipusingkan dengan prosedur yang berbelit-belit dan tenaga kerjapun mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat dengan didirikannya poliklinik bagi tenaga kerja. Selain itu pula Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga tenaga kerja.

## **Saran**

Kesimpulan di atas yang memperlihatkan bahwa implementasi atau pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda belum maksimal. Agar dapat menjadi lebih baik lagi dengan rendah hati penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak, adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) hendaknya untuk dapat selalu mengingatkan tenaga kerja untuk selalu menggunakan alat pelindung diri pada saat akan memasuki area bongkar muat. Dan bagi pihak pengawas hendaknya selalu memberikan teguran bagi tenaga kerja yang lalai dalam penggunaan alat perlindungan diri.

2. Pihak Koperasi harus memberikan pengarahan dan pengertian keselamatan kerja kepada tenaga kerja secara mendalam agar kecelakaan sekecil apapun tidak terjadi kepada tenaga kerja.
3. Untuk pengawas harus bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja di lokasi bongkar muat.
4. Poliklinik yang harus selalu siap setiap saat tenaga kerja membutuhkan perawatann medis.

### **Daftar Pustaka**

- Dainur, 1995, Materi-Materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Widya Medika.
- Khakim, Abdul. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitaitif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Naomi. 2002. "Tinjauan tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. ITCIKU: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Rahkmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosada Karya, Bandung, 1995
- Sastrohardiwiryo Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satori Djam'an. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Indonesia, Bandung: CV. Alfabeta
- Suma'mur, 1994. Kesehatan Kerja, Jakarta Widya Medika
- Sugianto.2001. "Tinjauan mengenai pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Kalihold Utama Plywood: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Stewart, Joseph dan James P. Lester, Publik Policy : An Evolutionary Approach (Second Edition, Australia : Wordsworth
- Wibowo Satriyo Benoe. 2002. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2002.

**Dokumen-dokumen :**

- *Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Subdit Pengembangan dan Informasi K3, Ciloto, 1996.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 *Tentang Keselamatan Kerja*.
- Undang –undang Nomor 13 Tahun 2003 *Ketenagakerjaan*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : *PER. 05/MEN/1996*.